PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

DISUSUN OLEH

NAMA : **HERNANDA N.S. PUTRA**

NIM : **11.11.4852**

KELOMPOK : **C**

PROGRAM STUDI : **S1 TEKNIK INFORMATIKA**

DOSEN : **TAHAJUDIN SUDIBYO, Drs**

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

ABSTRAK

Perjalanan hidup suatu bangsa sangat tergantung pada efektivitas penyelenggaraan Negara. Pancasila sebagai dasar Negara merupakan dasar dalam mengatur penyelenggaraan Negara di segala bidang, baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun hankam. Era global menuntut kesiapan segenap komponen bangsa untuk mengambil peranan sehingga dampak negative yang muncul dapat segera diantisipasi.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai ideologi negara, diharapkan mampu menjadi filter untuk menyerap pengaruh perubahan zaman di era globalisasi saat ini. Keterbukaan ideologi pancasila terurtama ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual. Ideologi negara merupakan hasil refleksi manusia atas kemampuannya mengadakan distansi (menjaga jarak) dengan dunia kehidupannya. Antara ideologi dan kenyataan hidup masyarakat terdapat hubungan dialektis, sehingga terjadi pengaruh timbal balik yang terwujud dalam interaksi yang disatu pihak memacu ideology agar makin realistis dan di lain pihak mendorong masyarakat agar makin mendekati bentuk yang ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat dan juga membentuk masyarakat menuju cita-cita. Dengan demikian, terlihat bahwa ideologi bukanlah sekedar pengetahuan teoritis belaka, tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan.

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak boleh berubah, namun dalam pelaksanaannya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap kurun waktu

LATAR BELAKANG MASALAH

Proses terjadinya pancasila dapat di bedakan menjadi dua yaitu: asal mula yang langsung dan asal mula yang tidak langsung. Adapun pengrtian asal mula tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Asal Mula Langsung**

Pengertian asal mula secara ilmiah filsafati di bedakan menjadi empat yaitu: causa materialis, causa formalis, causa efficient. Adapun rincian asal mual langsung Pancasila menurut Notonegora adalah sebagai berikut :

a. **Asal mula bahan (causa materialis)**

Asal bahan Pancasila adalah bangsa Indonesia itu sendiri karena Pancasila di gali dari nilai-nilai, adapt-istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari hari bangsa Indonesia.

b. **Asal mula bentuk (causa formalis)**

Hal ini di maksudkan bagaimana asal mula bentu atau bagaimana bentuk Pancasila itu di rumuskan sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. maka asal mula bentuk Pancasila adalah ; Soekarno bersama-sam denagn Drs. Moh Hatta serta anggota BPUPKI lainya merumuskan dan membahas pancasila terutama hubungan bentuk,rumusan dan nama Pancasila.

c. **Asal mula karya (causa efficient)**

Asal mula karya yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar Negara menjadi dasar negarayang satu. Adapun asal mula krya adalah PPKI sebagai pembentuk Negara dan atas dasar pembentuk Negara tang mengesahkan Pncasila menjadi dasar Negara yang sah, setelah melakukan pembahasan baik yang di lakuakan oleh BPUPKU , Panitia Sembilan.

2. Asal mula tidak langsung

Asal mula tidak langsung pancasila bila dirinci adalah sebagai berikut:

a. unsur-unsur Pancasila tersebut sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat Negara. Nilai-nilainya yaitu nilai keuhanan, niali kemanusiaan, nilai persatuan, niali kerakyatan, niali keadilan telah ada dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk Negara.

b. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk Negara, yang berupa nilai-nilai adapt istiadat, nilai kebudayaan serta nilai religius. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam memecahkan problema kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.

c. Dengan demikian dapat disimpulakan bahwa asal mula tidak langsung Pancasila pada hakikatnya bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai “Kausa materialis” atau sebagai asal mula tidak langsung nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan uraian di atas ,dapat memberikan gambaran pada kita bahwa pancasila itu pada hakikatnya adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang jauh sebelum bangsa Indonesia membentuk Negara.

RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa Pancasila disebut sebagai ideology terbuka?
2. Apakah arti “terbuka” dari Pancasila sebagai ideologi terbuka?
3. Apakah fungsi dari ideologi tersebut?
4. Apa sikap positif yang dapat kita terapkan dengan adanya Pancasila sebagai ideologi terbuka

PENDEKATAN HISTORIS

Pembahasan historis Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan rumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968. Pembatasan ini didasarkan pada dua pengandaian, yakni:

1) Telah tentang dasar negara Indonesia merdeka baru dimulai pada tanggal 29 Mei 1945, saat dilaksanakan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI);

2) Sesudah Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 tersebut, kerancuan pendapat tentang rumusan Pancasila dapat dianggap tidak ada lagi.

Permasalahan Pancasila yang masih terasa mengganjal adalah tentang penghayatan dan pengamalannya saja. Hal ini tampaknya belum terselesaikan oleh berbagai peraturan operasional tentangnya. Dalam hal ini, pencabutan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 (Ekaprasetia Pancakarsa) tampaknya juga belum diikuti upaya penghayatan dan pengamalan Pancasila secara lebih 'alamiah'. Tentu kita menyadari juga bahwa upaya pelestarian dan pewarisan Pancasila tidak serta merta mengikuti Hukum Mendel. Tinjauan historis Pancasila dalam kurun waktu tersebut kiranya cukup untuk memperoleh gambaran yang memadai tentang proses dan dinamika Pancasila hingga menjadi Pancasila otentik. Hal itu perlu dilakukan mengingat bahwa dalam membahas Pancasila, kita terikat pada rumusan Pancasila yang otentik dan pola hubungan sila-silanya yang selalu merupakan satu kebulatan yang utuh.

Sidang BPUPKI – 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945

Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan telaah pertama tentang dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut: 1) Peri Kebangsaan; 2) Peri Kemanusiaan; 3) Peri Ketuhanan; 4) Peri Kerakyatan; 5) Kesejahteraan Rakyat. Ketika itu ia tidak memberikan nama terhadap lima (5) azas yang diusulkannya sebagai dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang yang sama, Ir. Soekarno juga mengusulkan lima (5) dasar negara sebagai berikut: 1) Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme; 3) Mufakat atau

Demokrasi; 4) Kesejahteraan Sosial; 5) Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Dan dalam pidato yang disambut gegap gempita itu, ia mengatakan: "… saja namakan ini dengan petundjuk seorang teman kita – ahli bahasa, namanja ialah Pantja Sila …" (Anjar Any, 1982:26).

Piagam Jakarta 22 Juni 1945

Rumusan lima dasar negara (Pancasila) tersebut kemudian dikembangkan oleh "Panitia 9" yang lazim disebut demikian karena beranggotakan sembilan orang tokoh nasional, yakni para wakil dari golongan Islam dan Nasionalisme. Mereka adalah: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Mr. Achmad Subardjo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin. Rumusan sistematis dasar negara oleh "Panitia 9" itu tercantum dalam suatu naskah Mukadimah yang kemudian dikenal sebagai "Piagam Jakarta", yaitu: 1) Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemelukknya; 2) Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5) Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, "Piagam Jakarta" diterima sebagai rancangan Mukadimah hukum dasar (konstitusi) Negara Republik Indonesia. Rancangan tersebut – khususnya sistematika dasar negara (Pancasila) – pada tanggal 18 Agustus disempurnakan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Konstitusi RIS (1949) dan UUD Sementara (1950)

Dalam kedua konstitusi yang pernah menggantikan UUD 1945 tersebut, Pancasila dirumuskan secara 'lebih singkat' menjadi: 1) Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Perikemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kerakyatan; 5) Keadilan sosial. Sementara itu di kalangan masyarakat pun terjadi kecenderungan menyingkat rumusan Pancasila dengan alasan praktis/ pragmatis atau untuk lebih mengingatnya dengan variasi sebagai berikut: 1) Ketuhanan; 2) Kemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kerakyatan atau Kedaulatan Rakyat; 5) Keadilan sosial.

Keanekaragaman rumusan dan atau sistematika Pancasila itu bahkan tetap berlangsung sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang secara implisit tentu mengandung pula pengertian bahwa rumusan Pancasila harus sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968

Rumusan yang beraneka ragam itu selain membuktikan bahwa jiwa Pancasila tetap terkandung dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga memungkinkan terjadinya penafsiran individual yang membahayakan kelestariannya sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menyadari bahaya tersebut, pada tanggal 13 April 1968, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968 yang menyeragamkan tata urutan Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945

PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

Pancasila merupakan ideologi nasional negara Indonesia. Secara umum ideologi merupakan kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh serta sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan politik, pertahanan, kemanan, sosial, kebudayaan, dan keagamaan.

Pancasila dilihat dari sifat- sifat dasarnya, dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Pancasila Sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi- dimensi idealitas, normatif dan realitas. Rumusan- rumusan pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat umum, universal, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

a. Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari bahasa Latin(*Idea*; daya cipta sebagai hasil kesadaran manusia dan *logos*; ilmu). Istilah ini diperkenalkan oleh filsuf Perancis A. Destut de Tracy (1801) yang mempelajari berbagai gagasan manusia serta kadar kebenarannya. Ideologi juga diartikan sebagai falfasah hidup dan pandangan dunia. Biasanya, ideologi selalu mengutamakan asas-asas kehidupan politik dan kenegaraan sebagai satu kehidupan nasional yang berarti kepemimpinan, kekuasaan, dan kelembagaan dengan tujuan kesejahteraan.

Jika diterapkan untuk negara, maka ideologi diartikan sebagai kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik sebagai individu, sosial maupun dalam kehidupan bernegara. Berikut ini beberapa pengertian ideologi.

a. A. Destut de Tracy

Ideologi adalah bagian dari filsafat yang merupakan ilmu yang mendasari ilmu-ilmu lain seperti pendidikan, etika, politik, dan sebagainya.

b. Laboratorium IKIP Malang

Ideologi adalah seperangkat nilai, ide, dan cita-cita, serta pedoman dan metode melaksakan/ mewujudkannya.

c. Kamus Ilmiah Populer

Ideologi adalah cita-cita yang merupakan dasar salah satu system politik, paham kepercayaan, dan seterusnya (ideologi sosialis, ideologi islam, dan lain-lain)

d. Moerdiono

Ideologi adalah kompleksitas pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang (masyarakat) untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya.

e. Encyclopedia internasional

Ideologi adalah "system of ideas, belief, and attitudes which underlie the way of live in a particular group, class, or society" (sistem gagasan, keyakinan, dan sikap yang mendasari cara hidup suatu kelompok, kelas, atau masyarakat tertentu).

f. Prof. Padmo Wahyono, SH.

Ideologi diberi makna sebagai pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa, yang berupaseperangkat tata nilai yang dicita-citakan dan akan direlisasi di dalam kehidupan berkelompok. Ideologi ini akan memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju apa yang dicita-citakan.

g. Dr. Alfian

Ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan.

h. Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo

Ideology adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin mereka wujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit.

i. M. Syafaat Habib

ideologi adalah suatu kepercayaan politik sebagai hasil kemauan bersama sehingga terbentuk keyakinan yang kokoh dalam komunitas politik. Ideologi ini dalam perjalanan sejarah bangsa akan dijadikan landasan tidak bergerak yang tangguh, dan sekaligus menjadi cita-cita yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata masa kini dan masa selanjutnya.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ideology adalah, gagasan, cita-cita, dan nilai dasar yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat dan mendasar yang merupakan pencerminan dari pandangan hidup dan falsafah hidup suatu bangsa, berbentuk kepercayaan politik yang kokoh sebagai hasil kemauan bersama dan menjadi landasan yang tangguh dan arah yang jelas dalam mencapai cita-cita bersama.

b. Pengertian "TERBUKA" dari Ideologi

Arti "terbuka" dari ideology ditentukan oleh dua hal, pertama bersifat konseptual (struktur ideology) dan kedua bersifat dinamis (sikap para penganutnya).

1) Konseptual

Menurut **Corbett,** struktur ideology tersusun oleh: pandangan filsafat tentang alam semesta dan manusia (ontology), konsep masyarakat ideal yang dicita-citakan (epistemology), dan metodologi untuk mencapainya (metode berpikir). Ketiga unsur akan selalu terhubung dengan relasi heuristic (relasi inovatif), yaitu apabila pandangan filsafatinya mengenai alam semesta dan manusia bersifat tertutup,maka cita-cita instrinsiknya dengan sendirinya bersifat tertutup, sehingga akan tertutup pula metode berpikirnya.

2) Dinamis

Ideology yang bersifat abstrak, niscaya membutuhkan subjek pengamal/ pelaksana, yaitu sejumlah penganut atau pendukung yang mengidentifikasi

hidupnya dengan ideology yang dianutnya, menerima kebenarannya, berjuang, dan bekerja dengan setia untuknya.

Salah satu bawaan ideology adalah terbuka, artinya demi terwujudnya cita-cita intrinsiknya ideology itu harus senantiasa berkemampuan menanggapi tuntutan kemajuan zaman.

2. LAHIR DAN TUMBUH-KEMBANGNYA IDEOLOGI

Dalam meninjau lahir dan kembangnya ideologi ada 2 pandangan.

a. Pandangan Pertama,

Suatu ideologi berawal dari konsep-konsep abstrak yang berangsur-angsur tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan tumbuh-kembangnya masyarakat. Konsep-konsep tersebut kemudian mengakui adanya nilai dasar atau prinsip-prinsip tertentu, sehingga lama kelamaan diterima sebagai suatu kebenaran dan diyakini sebagai pegangan dalam menjalin kehidupan bersama dalam bentuk norma-norma.

b. Pandangan Kedua,

Suatu ideologi merupakan hasil olah piker para cendekiawan untuk kemudian dijabarkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. HAKIKAT DAN FUNGSI IDEOLOGI

Suatu ideology pada dasarnya merupakan hasil refleksi manusia atas kemampuannya mengadakan distansi (menjaga jarak) dengan dunia kehidupannya. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat dan juga membentuk masyrakat menuju cita-citanya. Ideology adalah satu pilihan yang jelas menuntut komitmen untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologis seseorang berarti semakin tinggi pula rasa komitmennya untuk melaksanakannya.

Dari urain tersebut dapat dikemukakan ideology mempunya fungsi :

a. Struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.

b. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukan tujuan dalam kehidupan manusia.

c. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan

d. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.

Dalam hal fungsi ideologi, Dr. Alfian berpendapat bahwa kegagalan suatu bangsa dalam mengembangkan ideologi secara bermakna dari waktu ke waktu dapat berakibat fatal terhadap ideologi tersebut. Ia dapat kehilangan atau mengalami krisis kredibilitas yang hebat, terutama terhadap generasi baru yang hidup dalam suasana dan situasi baru.

Bila demikian keadaannya, ideologi itu akan terasa sebagai sesuatu yang dipaksakan dan oleh karena itu menjadi otoriter atau totaliter sifatnya (penerapan ideologi komunis), meskipun pada dasarnya secara formal ideologi itu bersifat terbuka dan demokratis. Lebih berbahaya lagi bilamana mereka yang berkuasahanya memanfaatkan ideologi tersebut untuk keperluan legitimasi kekuasaannya, sedangkan sikap dan tingkah laku politiknya mungkin sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut.

4. SIKAP POSITIF TERHADAP PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

a. Sikap dan Perilaku Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan

Dengan menempatkan Pancasila sebagai ideologi terbuka, setiap warga negara Indonesia diberikan kebebasan memilih dan memeluk agama yang diakui

oleh pemerintah Indonesia. Sikap dan perilaku positif nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sehubungan dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat ditunjukan :

1) Melaksanakan kewajiban dalam keyakinannya trhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

2) Membina kerjasama dan tolong menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing

3) Mengembangkan toleransi antarumat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang

4) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain, dan lain-lain

b. Sikap dan Perilaku Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Kemanusiaan

Dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai sifat ideologi Pancasila yang terbuka, sikap dan perilaku kita harus senantiasa menempatkan manusia lain sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hak dan kewajibannya dihormati secara beradab. Dengan demikian tidak akan terjadi penindasan dan pemerasan. Sikap dan perilaku positif menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sehubungan dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat ditunjukan :

1) Memperlakukan manusia/ orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan

2) Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, kedudukan sosial, dan sebagainya

3) Mengembangkan sikap saling cinta sesama manusia, tenggang rasa dan tidak semena-mena kepada orang lain

4) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, seperti menolong orang lain, menolong korban banjir, dan lain sebagainya

c. Sikap dan Perilaku Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Persatuan Indonesia

Sesuai dengan sifat ideologi Pancasila yang terbuka bahwasanya mengharuskan setiap warga negara agar tetap mempertahankan keutuhan dan tegak-kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap dan perilaku positif menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan indonesia sehubungan dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat ditunjukan :

1) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jika suatu saat diperlukan

2) Mencintai tanah air dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia.

3) Mengembangkan persatuan indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika.

4) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa

d. Sikap dan Perilaku Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Permusyawaratan/ Perwakilan

Nilai-nilai permusyawaratan/ perwakilan mengandung makna bahwa hendaknya kita dalam bersikap dan bertingkah laku menghormati dan mengedepankan kedaulatan negara sebagai perwujudan kehendak seluruh rakyat. Rakyatlah yang sesungguhnya memiliki kedaulatan dan kedudukan terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap dan perilaku positif menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sehubungan dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat ditunjukan :

1) Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.

2) Tidak boleh memaksakan kehendak, melakukan intimidasi dan berbuat anarkis kepada orang/ barang milik orang lain jika tidak sependapat.

3) Mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

4) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

e. Sikap dan Perilaku Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Keadilan Sosial

Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dengan sifat Pancasila sebagai ideologi terbuka, diharapkan kesejahteraan lahir dan batin yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali bisa terwujud. Kesejahteraan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan merata di seluruh daerah. Sikap dan perilaku positif menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehubungan dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat ditunjukan :

1) Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan lingkungan masyarakat sekitar.

2) Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan orang lain/ umum.

3) Suka bekerja keras dalam memecahkan atau mencari jalan keluar atas masalah-masalah pribadi, masyarakat, bangsa dan negara.

4) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial melalui karya nyata.

KESIMPULAN

Ideologi adalah dasar atau landasan yang mendasari ilmu-ilmu serta pedoman dan metode untuk melaksanakan atau mewujudkan cita-cita bangsa. Pancasila sebagai dasar Negara telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia maka dari itu mesti dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, maupun bernegara. Betapa pun kokohnya suatu ideologi bila tidak memiliki dimensi fleksibilitas atau keterbukaan, akan mengalami kehancuran dalam menghadapi tantangan

Pancasila sebagai ideologi merupakan ide atau gagasan-gagasan yang menjadi falsafah hidup yang harus dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, maupun berNegara. Sebagai ideologi nasional Pancasila telah tumbuh dan berkembang dari sosio-budaya masyarakat yang terkristalisasi menjadi nilai filosofis. Ideologi yang konstitusional sebagai ideology terbuka, Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Ideologi lahir dan kemudian berkembang dari adanya kepercayaan politik yang terbentuk dan kemauan umum, perjanjian masyarakat sebagai realitas historis. Nilai-nilai pancasila tidak boleh diubah-ubah,namun pelaksanaanya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap kurun waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Budiyanto, "*Pendidikan Kewarganegaraan jilid 3",* Jakarta, Penerbit Erlangga, 2007.

Pramudito Sumalyo, "*ideology Negara dan Tantangan Zaman",* Jakarta, PT Golden Terayon Press, 1995.

Moerdiono, dkk., "*Pancasila Sebagai Ideologi",* Jakarta, BP-7 Pusat, 1992.